

Penerapan *Good Governance* dalam Evaluasi Pembangunan Infrastruktur di Kelurahan Buraen Kabupaten Kupang Nusa Tenggara Timur

Ernesto Do Santos Nahak¹, Kalistaurisius Herbi Brain², Yohanes Kornelius Ethelbert³, Marianus Kleden⁴, Indriyati⁵, Stephanie Perdana Ayu Lawalu⁶

^{1,2,3,4,5,6}Administrasi Publik, Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu politik, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Indonesia

*e-mail: ernestodosantosnahak@gmail.com¹, kalistaurisiusbrain@gmail.com², ethgatus@unwira.ac.id³, marianuskleden0505@gmail.com⁴, Indrisutrisno770@gmail.com⁵, ninalawalu@unwira.ac.id⁶

Abstrak

Pembangunan infrastruktur berperan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Namun, di Kelurahan Buraen, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, masih ditemukan pembangunan yang kurang efektif dan tidak berkelanjutan. Masalah utama yang dihadapi adalah kualitas infrastruktur yang belum optimal serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan. Pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk mengevaluasi hasil pembangunan infrastruktur guna mengetahui sejauh mana pelaksanaannya sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Metode yang digunakan mencakup observasi lapangan, wawancara dengan warga dan aparat kelurahan, serta analisis data sekunder dari instansi terkait. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa sebagian infrastruktur seperti jalan desa, saluran air, dan fasilitas umum telah dibangun, namun pemeliharaan masih kurang dan kualitasnya tidak merata. Rendahnya keterlibatan warga juga menjadi kendala dalam pencapaian hasil yang optimal. Oleh karena itu, dibutuhkan penerapan prinsip *good governance* secara konsisten, terutama dalam hal transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Kesimpulannya evaluasi ini memberikan gambaran nyata kondisi infrastruktur di Kelurahan Buraen serta menjadi dasar penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih efektif dan berkelanjutan di masa depan.

Kata Kunci: Evaluasi, *Good Governance*, Kelurahan Buraen, Partisipasi Masyarakat, Pembangunan Infrastruktur

Abstract

Infrastructure development plays a vital role in supporting economic growth and improving the quality of life for communities. However, in Buraen Subdistrict, Kupang Regency, East Nusa Tenggara, infrastructure development is often ineffective and unsustainable. The main issues identified include suboptimal infrastructure quality and low community participation in planning and monitoring processes. This community service activity aims to evaluate the outcomes of infrastructure development and assess its alignment with the principles of *good governance*. The methods used include field observations, interviews with residents and local officials, and secondary data analysis from relevant institutions. The evaluation results show that while some infrastructure, such as village roads, drainage systems, and public facilities, has been built, maintenance is still lacking, and quality remains uneven. Low public involvement also hampers the achievement of optimal outcomes. Therefore, the consistent application of *good governance* principles—particularly transparency, accountability, and public participation—is essential. This evaluation provides a realistic overview of the infrastructure condition in Buraen Subdistrict and serves as a critical basis for formulating more effective and sustainable development policies in the future.

Keywords: Buraen Subdistrict, Community Participation, Evaluation, *Good Governance*, Infrastructure Development

1. PENDAHULUAN

Infrastruktur publik merupakan kebutuhan dasar fisik pengorganisasian sistem struktur yang diperlukan suatu negara untuk jaminan ekonomi sektor publik dan sektor privat sebagai layanan dan fasilitas yang diperlukan agar perekonomian dapat berfungsi dengan baik (Tatang Syahban Adi Syahputra et al., 2021). Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu faktor kunci dalam mendorong pertumbuhan sosial dan ekonomi di tingkat lokal. Pembangunan

infrastruktur di pedesaan juga merupakan satu diantara strategi penting dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat (Pedesaan et al., 2024). Infrastruktur yang memadai mampu meningkatkan aksesibilitas, memperlancar aktivitas ekonomi, serta menunjang kesejahteraan Masyarakat. Kelurahan Buraen yang terletak di wilayah dengan karakteristik geografis perbukitan dan kondisi sosial ekonomi yang beragam, tengah berupaya melakukan percepatan pembangunan infrastruktur untuk mendukung peningkatan kualitas hiduparganya. Pembangunan desa meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan (Arias & Naranjo, 2014). Namun, berdasarkan observasi awal dan keluhan masyarakat yang muncul dalam forum-forum diskusi warga, pelaksanaan pembangunan infrastruktur di wilayah ini dinilai masih menghadapi sejumlah permasalahan, terutama terkait partisipasi masyarakat, keterbukaan informasi, dan keberlanjutan hasil Pembangunan. Dalam konteks pembangunan ekonomi di daerah tertinggal seperti Kelurahan Buraen, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa pembangunan infrastruktur tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga dapat memberdayakan masyarakat secara ekonomi dan sosial (Zam, 2025).

Pemerintahan yang baik (good governance) menjadi isu kontekstual manajemen administrasi publik saat ini (Riwukore et al., 2022). Penerapan prinsip-prinsip good governance menjadi kunci utama dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. Ketika transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat diimplementasikan secara menyeluruh, maka proses pembangunan tidak hanya menjadi lebih demokratis tetapi juga lebih efektif. Salah satu indikator yang mempengaruhi good governance adalah kompetensi aparatur pemerintah (Wafa et al., 2020). Terlebih di wilayah-wilayah yang memiliki karakter geografis dan sosial yang kompleks seperti Kelurahan Buraen, pendekatan ini memberikan ruang bagi masyarakat untuk turut menentukan prioritas dan mengawal kualitas pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan diartikan sebagai ikut serta masyarakat dalam pembangunan, baik itu dalam kegiatan-kegiatan pembangunan serta ikut dalam memanfaatkan dan menikmati hasil pembangunan itu sendiri (Riskayanti, 2022).

Tujuan pembangunan desa meliputi; Pertama, tujuan ekonomi meningkatkan produktivitas di daerah pedesaan dalam rangka mengurangi kemiskinan di daerah pedesaan. Kedua, tujuan sosial diarahkan kepada pemerataan kesejahteraan penduduk desa. Ketiga, tujuan kultural dalam arti meningkatkan kualitas hidup pada umumnya dari masyarakat pedesaan. Keempat, tujuan kebijakan menumbuhkan dan mengembangkan partisipasi masyarakat desa secara maksimal dalam menunjang usaha-usaha pembangunan serta dalam memanfaatkan dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan (Prasarana et al., 2019). Berdasarkan data kelurahan tahun 2023, Kelurahan Buraen memiliki jumlah penduduk sebanyak 3.325 jiwa yang tersebar di 9 RW dan 24 RT. Sebagian besar penduduk bekerja sebagai petani dan buruh harian, dengan tingkat pendidikan yang masih relatif rendah. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur Pedesaan seringkali terkait erat dengan pemberdayaan masyarakat (Zubaidah et al., 2024). Sarana dan prasarana umum seperti jalan lingkungan, saluran drainase, dan fasilitas publik lainnya masih terbatas, dan beberapa di antaranya mengalami kerusakan atau tidak terawat dengan baik. Kondisi ini menunjukkan adanya kebutuhan nyata akan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan dikelola secara partisipatif dan akuntabel. Untuk membantu mewujudkan pemerataan infrastruktur jalan diperlukan langkah yang tepat untuk mendukung terjadinya sebuah perubahan seperti pembangunan infrastruktur jalan dan fasilitas lainnya (Singal & Priambodo, 2024).

Permasalahan utama yang menjadi fokus kegiatan ini adalah belum optimalnya penerapan prinsip-prinsip good governance dalam evaluasi pembangunan infrastruktur. Prinsip good governance di setiap penyelenggaraan pemerintahan berperan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih (Mufti Rahajeng, 2021). Transparansi Dan Akuntabilitas mempunyai peran penting terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang baik, demokratis dan amanah. Penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggungjawab, serta efisien dan efektif dengan menjadi keseimbangan sinergitas konstruktif antara domain negara, sektor swasta dan

masyarakat (Rachmawati & Dian Indudewi, 2024). Lemahnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik menyebabkan proses pembangunan menjadi top-down dan kurang mencerminkan kebutuhan riil masyarakat. Padahal, good governance menekankan pentingnya keterbukaan informasi, partisipasi warga, serta akuntabilitas lembaga publik sebagai pilar utama dalam pengelolaan pemerintahan yang efektif dan demokratis. Good governance sebagai sebuah mekanisme, praktik, dan tata cara pemerintah dan warga mengatur sumber daya serta memecahkan masalah-masalah publik (Sumiyati & Darsono, 2023).

Dalam konteks pengabdian kepada masyarakat ini, kegiatan dirancang sebagai bentuk hilirisasi hasil penelitian yang menekankan model evaluasi pembangunan berbasis partisipasi warga. Dalam pembangunan di kelurahan, partisipasi masyarakat adalah salah satu elemen yang penting. Partisipasi masyarakat dalam tahapan pembuatan sebuah kebijakan publik menjadi cerminan dilaksanakannya demokrasi (Hafrida et al., 2023). Pendekatan ini memadukan praktik evaluasi partisipatif dengan prinsip-prinsip good governance, termasuk transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan responsivitas terhadap kebutuhan lokal. Konsep good governance lebih menekankan kepada terwujudnya demokrasi, oleh karena itu penyelenggara negara yang demokratis akan menjadi syarat mutlak demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang berdasar kepada partisipasi masyarakat, tanggung jawab (akuntabilitas), serta transparansi (Situmorang et al., 2020). Model ini diharapkan menjadi alternatif yang aplikatif dan kontekstual dalam memperkuat kapasitas masyarakat dan pemerintah lokal dalam mengelola pembangunan infrastruktur.

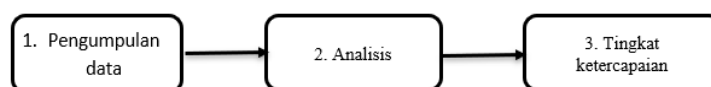
Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menerapkan prinsip-prinsip good governance melalui pendekatan evaluatif-partisipatif dalam menilai dan memperbaiki proses pembangunan infrastruktur di Kelurahan Buraen. Kegiatan ini diharapkan mampu mendorong partisipasi aktif warga, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas proses pembangunan, serta memperkuat kapasitas lokal dalam mengelola dan mengevaluasi pembangunan secara berkelanjutan.

2. METODE

Untuk mencapai tujuan evaluasi pembangunan infrastruktur di Kelurahan Buraen, kegiatan pengabdian ini dilaksanakan selama dua bulan mulai dari 8 April sampai 8 Juni 2025 dengan menggunakan pendekatan partisipatif dan evaluatif. Pendekatan ini melibatkan langsung masyarakat dan pemangku kepentingan lokal dalam setiap tahapan pelaksanaan.

Dalam tahapan analisis data, mahasiswa melakukan triangulasi antara hasil observasi, wawancara, dan data sekunder guna memastikan validitas informasi. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan pendekatan tematik, dimana setiap temuan dikelompokkan berdasarkan kategori seperti kualitas infrastruktur, partisipasi masyarakat, serta dampak sosial dan ekonomi. Pendekatan ini memungkinkan mahasiswa untuk mengidentifikasi pola-pola yang berulang serta mengungkap relasi antara berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilan pembangunan.

Metode yang digunakan terdiri dari tiga tahapan utama: pengumpulan data, analisis, dan tingkat ketercapaian.



Gambar 1. Diagram alir tahapan kegiatan

2.1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam pengabdian masyarakat adalah proses memperoleh informasi yang relevan dan akurat dari masyarakat atau lingkungan sasaran untuk memahami kebutuhan, permasalahan, dan potensi yang ada. Data yang dikumpulkan ini menjadi dasar dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program pengabdian agar tepat sasaran dan berdampak nyata.

Metode pengumpulan data bisa berupa observasi, wawancara, kuesioner, atau dokumentasi, tergantung pada tujuan dan kondisi lapangan.

Data primer dikumpulkan melalui wawancara terstruktur dan semi-terstruktur dengan perwakilan masyarakat (ketua RT/RW, tokoh adat, dan tokoh perempuan), aparat kelurahan, serta kelompok pemuda. Selain itu, dilakukan observasi lapangan terhadap kondisi fisik infrastruktur seperti jalan lingkungan, saluran air, dan fasilitas publik (balai warga dan MCK umum). Data sekunder diperoleh dari dokumen perencanaan pembangunan desa, laporan pelaksanaan proyek, dan peta wilayah.

2.2. Alat Ukur dan Teknik Evaluasi

Pengukuran keberhasilan dilakukan dengan indikator kualitatif dan kuantitatif, yaitu:

- a. Kualitas Fisik Infrastruktur: diukur melalui kriteria teknis (panjang jalan rusak, lebar saluran air, jumlah fasilitas yang berfungsi), dibandingkan dengan standar minimum infrastruktur pedesaan (Permendes No. 7/2021).
- b. Partisipasi Masyarakat: dinilai dari jumlah warga yang terlibat dalam musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) dan kegiatan gotong royong, yang diukur melalui data kehadiran dan frekuensi kegiatan.
- c. Perubahan Sosial dan Ekonomi: diukur melalui wawancara mendalam terkait persepsi warga tentang kemudahan akses, peningkatan mobilitas, dan peluang ekonomi lokal pasca pembangunan.
- d. Kepuasan Masyarakat: diukur dengan skala Likert 1–5 melalui kuesioner, mencakup persepsi atas kualitas infrastruktur dan dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari.

2.3. Tingkat Ketercapaian

Keberhasilan kegiatan diukur dari:

- a. Perubahan Sikap: meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelibatan dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan.
- b. Perubahan Sosial Budaya: meningkatnya semangat gotong royong dan keaktifan warga dalam musyawarah desa.
- c. Perubahan Ekonomi: munculnya kegiatan ekonomi mikro (warung, jasa angkutan lokal) yang memanfaatkan infrastruktur yang telah dibangun.

Metode evaluatif ini memberikan data yang dapat diverifikasi dan dianalisis untuk menilai efektivitas serta dampak pembangunan infrastruktur secara menyeluruh. Tingkat ketercapaian dievaluasi selama dan sesudah pelaksanaan kegiatan dengan membandingkan kondisi awal dan hasil akhir berdasarkan indikator yang telah ditetapkan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Penilaian lebih lanjut terhadap indikator kepuasan masyarakat juga memperlihatkan bahwa kelompok usia produktif (21–40 tahun) menunjukkan tingkat kepuasan yang lebih tinggi dibandingkan kelompok usia lanjut. Hal ini menunjukkan bahwa kelompok produktif lebih merasakan manfaat langsung dari peningkatan pembangunan infrastruktur, khususnya dalam hal mobilitas dan akses ekonomi. Keterlibatan tokoh perempuan juga menjadi indikator baru dalam pelaksanaan gotong royong dan forum Musrenbang, memperlihatkan inklusi sosial yang meningkat.

3.1.1. Profil Responden

Profil respon dalam pengabdian kepada masyarakat adalah gambaran singkat tentang tanggapan, partisipasi, dan persepsi masyarakat terhadap kegiatan pengabdian yang dilakukan. Profil ini membantu menilai sejauh mana kegiatan diterima dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

3.1.1.1. Jenis Kelamin Responden

Jenis kelamin responden adalah informasi yang menunjukkan apakah responden (orang yang menjawab kuesioner atau wawancara) berjenis kelamin laki-laki atau perempuan. Data ini penting untuk analisis karena bisa memengaruhi pola jawaban, partisipasi, atau sudut pandang dalam kegiatan pengabdian atau penelitian.

Berikut data mengenai jenis kelamin responden:

Tabel 1. Jenis Kelamin Responden	
Jenis kelamin	Jumlah
-Laki-Laki	1.389 orang
-Perempuan	1.936 orang
Total	3.325 orang

Berdasarkan data diatas, jenis kelamin responden di kelurahan Buraen, Kabupaten Kupang yang diambil menunjukkan bahwa responden 155 perempuan lebih banyak dari pada laki-laki yaitu sebanyak 1.936 orang dan laki-laki sebanyak 1.389 orang.

3.1.1.2. Usia Responden

Usia responden dalam pengabdian kepada masyarakat adalah data tentang umur individu yang menjadi peserta atau sasaran kegiatan pengabdian. Informasi ini penting untuk mengetahui kelompok umur yang terlibat, menyesuaikan materi atau pendekatan yang digunakan, serta menganalisis efektivitas program berdasarkan rentang usia tertentu. Usia biasanya dicatat dalam bentuk angka (misalnya 35 tahun) atau dikelompokkan (misalnya 20–30 tahun, 31–40 tahun, dll).

Berikut data mengenai usia responden:

Tabel 2. Usia Responden	
Usia	Jumlah
1-10 tahun	516 orang
11-20 tahun	748 orang
21-30 tahun	396 orang
31-40 tahun	218 orang
41-50 tahun	439 orang
51-60 tahun	451 orang
61-70 tahun	366 orang
71-80 tahun	179 orang
81-90 tahun	12 orang
Total	3.325 orang

Berdasarkan data diatas, usia responden pada kelurahan Buraen, Kabupaten Kupang menunjukkan bahwa yang usianya 11-20 tahun lebih banyak yaitu 748 orang.

3.1.2. Indikator Kepuasan

Indikator keberhasilan yang digunakan meliputi:

- Indikator Fisik: Penilaian terhadap kondisi jalan dan fasilitas umum menunjukkan bahwa 55% infrastruktur yang dievaluasi berada dalam kondisi layak, meningkat dari sebelumnya 42% (berdasarkan laporan warga dan verifikasi lapangan).
- Indikator Sosial: Partisipasi masyarakat dalam pembangunan meningkat signifikan (dari 35% menjadi 68% partisipatif aktif).
- Indikator Kepuasan: Skor rata-rata kepuasan masyarakat terhadap hasil pembangunan meningkat dari 2,7 menjadi 4,1 (skala Likert 1–5).

Tabel 3. Indikator kepuasan

No	Indikator	Sebelum	Sesudah
1	Indikator fisik	42%	55%
2	Indikator sosial	35%	68%
3	Indikator kepuasan	2,7 skala likert	4,1 skala likert

3.2. Pembahasan Pelaksanaan kegiatan

3.2.1. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Pengumpulan data dalam pengabdian masyarakat adalah proses memperoleh informasi yang relevan dan akurat dari masyarakat atau lingkungan sasaran untuk memahami kebutuhan, permasalahan, dan potensi yang ada. Data yang dikumpulkan ini menjadi dasar dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program pengabdian agar tepat sasaran dan berdampak nyata. Teknik pengumpulan data yang biasanya digunakan mencakup beberapa metode berikut:

a. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data dengan cara mengamati langsung kondisi, perilaku, atau situasi masyarakat di lokasi kegiatan. Tujuannya untuk mendapatkan informasi faktual yang akurat tanpa intervensi, misalnya melihat langsung bagaimana masyarakat memanfaatkan fasilitas umum atau menjalankan kebiasaan tertentu.



Gambar 2. Kondisi Ifrastruktur kelurahan Buraen

b. Kuisisioner

Kuisisioner adalah alat pengumpulan data berupa daftar pertanyaan tertulis yang diberikan kepada responden untuk dijawab, baik secara langsung (offline) maupun online. Kuisisioner digunakan untuk mengetahui pendapat, pengetahuan, sikap, atau kebutuhan masyarakat terkait tema pengabdian.

c. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada individu atau kelompok masyarakat. Wawancara bisa bersifat terstruktur (dengan daftar pertanyaan) atau bebas. Metode ini berguna untuk mendapatkan informasi mendalam dan sudut pandang masyarakat secara langsung.



Gambar 3. Wawancara masyarakat terkait infrastuktur di kelurahan buraen

d. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode dengan mengumpulkan dan memanfaatkan dokumen atau data tertulis, foto, video, atau arsip yang relevan dengan kegiatan pengabdian. Dokumentasi berguna sebagai bukti pelaksanaan kegiatan serta bahan evaluasi dan pelaporan.

Semua metode ini saling melengkapi dalam mengumpulkan data yang valid dan komprehensif selama proses pengabdian kepada masyarakat.

3.2.2. Evaluasi Dampak

Evaluasi dampak dalam pengabdian kepada masyarakat adalah proses penilaian yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kegiatan pengabdian membawa perubahan nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat sasaran. Evaluasi ini menilai efek jangka panjang dari kegiatan, seperti peningkatan pengetahuan, keterampilan, kesejahteraan, atau perubahan perilaku masyarakat setelah program dijalankan.

a. Perubahan Dampak Jangka Pendek

Dalam jangka pendek, kegiatan ini telah menghasilkan perubahan pada aspek kesadaran dan perilaku masyarakat. Sekitar 78% responden menyatakan meningkatnya pemahaman terhadap pentingnya partisipasi dalam pembangunan desa. Selain itu, terjadi peningkatan partisipasi dalam Musrenbang, dari sebelumnya 20–30 peserta menjadi lebih dari 50 peserta, termasuk perwakilan perempuan dan pemuda.

Kegiatan ini juga memunculkan inisiatif warga dalam pemeliharaan jalan lingkungan secara swadaya, terutama di RT 04 dan RT 07, yang sebelumnya tidak aktif. Kegiatan gotong royong menjadi lebih terorganisir dan dijadwalkan secara rutin oleh warga.

b. Perubahan Dampak Jangka Panjang (Potensial)

Secara jangka panjang, kegiatan ini diproyeksikan memberikan dampak pada perencanaan kebijakan desa yang lebih partisipatif dan berkelanjutan. Rekomendasi hasil evaluasi telah diterima oleh pihak kelurahan dan direncanakan akan diintegrasikan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) tahun berikutnya.

Selain itu, dengan adanya data pemetaan infrastruktur berbasis partisipatif, pemerintah desa kini memiliki dasar kuat untuk pengajuan bantuan ke tingkat kabupaten. Dalam jangka panjang, hal ini berpotensi meningkatkan aksesibilitas dan ekonomi lokal, terutama dalam distribusi hasil pertanian dan akses ke layanan publik.

c. Keunggulan dan Kelemahan

Keunggulan utama kegiatan ini adalah kemampuannya menjangkau lapisan masyarakat secara menyeluruh dan mendorong kesadaran kolektif mengenai peran serta dalam pembangunan. Evaluasi ini juga menghasilkan dokumen pemetaan kebutuhan infrastruktur yang dapat langsung digunakan oleh pemerintah kelurahan dalam perencanaan program lanjutan.

Namun, terdapat beberapa kelemahan, di antaranya keterbatasan waktu dan sumber daya yang menyebabkan tidak seluruh titik infrastruktur dapat dievaluasi secara menyeluruh. Selain itu, keterbatasan kapasitas teknis masyarakat membuat proses dokumentasi hasil evaluasi harus dibantu oleh fasilitator luar.

d. Tingkat Kesulitan dan Peluang Pengembangan

Tingkat kesulitan pelaksanaan tergolong sedang, dengan tantangan utama berupa akses medan yang sulit dan kurangnya data teknis awal. Produksi luaran berupa dokumen pemetaan partisipatif dan rekomendasi teknis juga membutuhkan proses validasi berulang dengan masyarakat agar sesuai dengan konteks lokal.

Peluang pengembangan ke depan sangat terbuka, terutama jika kegiatan ini dijadikan model evaluasi partisipatif untuk kelurahan lain di Kecamatan Amarasi Selatan. Kegiatan ini juga dapat dikembangkan menjadi sistem pemantauan infrastruktur berbasis komunitas yang dilakukan secara berkala.

4. KESIMPULAN

Hasil evaluasi pembangunan infrastruktur di Kelurahan Buraen menunjukkan peningkatan nyata pada tiga indikator utama. Secara kuantitatif, kondisi fisik infrastruktur yang layak meningkat dari 42% menjadi 55%, partisipasi masyarakat dalam pembangunan naik dari

35% menjadi 68%, dan tingkat kepuasan warga terhadap hasil pembangunan melonjak dari skor 2,7 menjadi 4,1 (skala Likert 1–5).

Secara akademis, kegiatan ini dapat menjadi studi kasus bagi pendekatan evaluatif-partisipatif berbasis good governance yang dapat direplikasi di wilayah lain. Di sisi lain, secara kebijakan, hasil evaluasi ini menegaskan perlunya penyesuaian regulasi di tingkat Kelurahan agar proses pembangunan lebih terbuka terhadap masukan masyarakat. Oleh karena itu, dukungan dari pemerintah daerah dan perguruan tinggi sebagai mitra perlu diperkuat untuk mendampingi proses perencanaan dan pengawasan pembangunan di tingkat kelurahan secara berkelanjutan.

Kegiatan ini berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelibatan dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan, terlihat dari lonjakan peserta Musrenbang dan kegiatan gotong royong yang lebih terorganisir. Selain itu, warga mulai mengambil inisiatif swadaya untuk pemeliharaan jalan lingkungan. Namun, tantangan utama yang dihadapi adalah akses medan yang sulit, keterbatasan waktu dan sumber daya, serta kapasitas teknis masyarakat yang masih rendah, yang menghambat evaluasi menyeluruh dan pendokumentasian data oleh warga sendiri.

Sebagai rekomendasi konkret bagi pemerintah kelurahan dan mitra pembangunan, perlu dilakukan: a) Monitoring rutin berbasis komunitas dengan melibatkan RT/RW sebagai pengawas lapangan. b) Pelatihan teknis sederhana bagi warga, khususnya dalam dokumentasi dan evaluasi infrastruktur. c) Formalitas pelibatan komunitas melalui peraturan desa, misalnya mewajibkan keterlibatan perwakilan perempuan dan pemuda dalam setiap forum Musrenbang. d) Integrasi data evaluasi partisipatif dalam RKPDes secara resmi, agar hasil evaluasi berdampak langsung pada perencanaan anggaran dan program pembangunan selanjutnya.

Langkah-langkah ini diperlukan untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas pembangunan infrastruktur di masa mendatang.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, khususnya Program Studi Administrasi Publik, yang telah memberikan dukungan moral, akademik, dan fasilitas dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian ini. Dukungan tersebut sangat berarti dalam menunjang kelancaran kegiatan dan penyusunan laporan dengan judul "Evaluasi Pembangunan Infrastruktur di Kelurahan Buraen". Semoga hasil dari pengabdian ini dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat serta menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan pembangunan di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Arias, L. M. E., & Naranjo, J. (2014). No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title. *Applied Microbiology and Biotechnology*, 85(1), 2071–2079.
- Hafrida, L., Hildawati, H., Sari, Y., Yanti, M., & Afrizal, D. (2023). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Dikelurahan Cempedak Rahuk Kecamatan Tanah Putih. *Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(1), 507–527. <https://doi.org/10.14710/dialogue.v5i1.16962>
- Mufti Rahajeng, M. (2021). Penerapan Prinsip–Prinsip Good Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Wlahar Wetan Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas. *Public Policy and Management Inquiry*, 4(2), 163. <https://doi.org/10.20884/1.ppmi.2020.4.2.3912>
- Pedesaan, M., Bulungan, K., Al Amrie, M., & Nur, A. A. (2024). Analisis Dampak Pembangunan Infrastruktur terhadap Kesejahteraan. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Dan Manajemen (EKMAN)*, 3(1), 2829–2715. <https://ekman.fakultasekonomiunikaltar.ac.id/index.php/Ekman>
- Prasarana, D. A. N., Desa, D. I., Kecamatan, B. O. E., & Selatan, N. P. (2019). *Tadanungi*.

- Rachmawati, W. C., & Dian Indudewi. (2024). Desa Pembangunan Infrastruktur Desa Blerong. *Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi*, 22(2), 187–196.
- Riskayanti. (2022). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Romanglasa Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa. *KIMAP: KAJIAN Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik*, 3(3), 1–15.
- Riwukore, J. R., Habaora, F., & Terttiaavini, T. (2022). Good Governance Dalam Mengukur Kinerja Lembaga Negara (Review). *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 7(1), 1–10. <https://doi.org/10.36982/jpg.v7i1.1974>
- Singal, A. N. H., & Priambodo, B. (2024). Pembangunan dan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan : Dinas PU Bina Marga dan SDA Kabupaten Sidoarjo. *NeoRespublica : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(2), 879–891. <https://doi.org/10.52423/neores.v5i2.273>
- Situmorang, C. V., Simanjuntak, A., & Elisabeth, D. M. (2020). Peran Partisipasi Masyarakat, Akuntabilitas, Dan Transparansi Dalam Mewujudkan Good Governance Terhadap Pembangunan Desa. *Jurnal Ilmu Keuangan Dan Perbankan (JIKA)*, 9(2), 131–142. <https://doi.org/10.34010/jika.v9i2.2985>
- Sumiyati, S., & Darsono, D. (2023). Pelaksanaan Good Governance Dalam Pemerintahan Desa Socorejo Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban. *JURNAL ILMU SOSIAL Dan ILMU POLITIK*, 3(2), 46–63. <https://doi.org/10.30742/juispol.v3i2.3485>
- Tatang Syahban Adi Syahputra, Purba, E., & Damanik, D. (2021). Pengaruh Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Subulussalam. *Jurnal Ekuilnomi*, 3(2), 104–114. <https://doi.org/10.36985/ekuilnomi.v3i2.261>
- Wafa, R., Basri, Y. M., & Desmiyawati. (2020). Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah, Partisipasi Masyarakat dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terhadap Penerapan Good Governance (Studi Empiris Pada Pemerintah Desa di Kabupaten Pelalawan). *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, 4(1), 60–71.
- Zam, M. Z. (2025). Dampak Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Terhadap Pengurangan Kemiskinan di Daerah Pedesaan. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(1), 285–299. <https://doi.org/10.56338/jks.v8i1.6707>
- Zubaidah, S., Hermansyah, & Indah, V. (2024). Dampak Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Partisipasi Pembangunan Infrastruktur Pedesaan di Pedamaran Timur, Ogan Komering Ilir. *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Studi Kebijakan (JIASK)*, 7(1), 69–86.

Halaman Ini Dikosongkan